



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bonto No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

LAPORAN HASIL REVIU RKA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023



NOMOR : 261/REV-RKA/IX/2022/ITDA
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2022

DAFTAR ISI

I.	Ringkasan Eksekutif	1
II.	Dasar Hukum	2
III.	Tujuan Reviu	2
IV.	Ruang Lingkup Reviu	2
V.	Metodologi Reviu	2
VI.	Gambaran Umum	3
VII.	Uraian Hasil Reviu	7
VIII.	Apresiasi	33



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bonto No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

LAPORAN HASIL REVIU RKA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD, dengan berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Kepala Daerah dan DPRD. Selanjutnya Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman Kepala perangkat daerah menyusun RKAP-SKPD. Kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Sesuai instruksi pimpinan, Inspektorat Daerah melakukan Reviu RKA Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah. Adapun revidi dilaksanakan pada saat setelah ditetapkannya KUA/PPAS.

II. DASAR HUKUM

- A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Revidi atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. TUJUAN REVIDI

Tujuan dari dilaksanakannya Revidi RKA Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi RKA-SKPD yang meliputi:

- 1. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023;
- 2. Kelayakan anggaran;
- 3. Kesesuaian kode rekening/akun;
- 4. Pemenuhan alokasi anggaran sesuai ketentuan.

IV. RUANG LINGKUP REVIDI

Ruang lingkup revidi adalah pengujian atas penyusunan dokumen RKA-SKPD. Ruang lingkup revidi mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

V. METODOLOGI REVIDI

- A. Revidi RKA pokok Tahun Anggaran 2023 pada SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.

B. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen rencana Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan RKA-SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2023.

C. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 700/001/REV-RKA/IX/2022/ITDA, tanggal 12 September 2022, dengan susunan tim sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H
NIP. 19630727 199303 1 014

2. Wakil Penanggung Jawab : Dra. ANDI MULIANTI
NIP. 19670408 199303 2 012

3. Ketua Tim : ANDI PAHLAWAN
NIP. 19800129 201001 1 004

4. Anggota Tim : a. Hj. AYU RAHMAWATI TAMAR, S.Farm
NIP. 19861020 201101 2 021

b. SULIPNO PRATOMO, S.H
NIP. 19900420 201903 1 009

Reviu RKA pokok Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan mulai tanggal 14 September s/d 20 September 2023.

VI. GAMBARAN UMUM

A. Penyusunan RKA-SKPD dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- B. Berdasarkan peraturan tersebut, Penyusunan RKA-SKPD harus berdasarkan Pagu Anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam PPAS. Total pagu anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2023 dalam PPAS, sebesar Rp9.041.051.096,00 (sembilan miliar empat puluh satu juta lima puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah).
- C. Dari total pagu anggaran tersebut, Program RKA-SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tabel berikut:

No	URAIAN	PAGU (Rp)
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	50.000.000,00
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.000.000.000,00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.000.000.000,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.170.961.000,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.170.961.000,00
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	50.000.000,00
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.120.961.000,00
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.080.000.000,00

No	URAIAN	PAGU (Rp)
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.080.000.000,00
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.080.000.000,00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	50.000.000,00
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	50.000.000,00
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	50.000.000,00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	100.000.000,00
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100.000.000,00
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	100.000.000,00
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.581.790.096,00
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.284.000,00
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.276.000,00
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.366.000,00
3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.560.000,00
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000,00
3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000,00
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.603.000,00
3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.479.000,00
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.027.724.096,00
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.005.990.096,00
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.318.000,00
3.31.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.416.000,00
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.550.000,00
3.31.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.200.000,00

No	URAIAN	PAGU (Rp)
3.31.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.350.000,00
3.31.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000,00
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.450.000,00
3.31.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,00
3.31.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12.200.000,00
3.31.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.250.000,00
3.31.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00
3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	460.680.000,00
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.100.000,00
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.820.000,00
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.820.000,00
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.700.000,00
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	321.240.000,00
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.298.000,00
3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	20.142.000,00
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.156.000,00
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	627.234.000,00
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.154.000,00
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.180.000,00
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	525.900.000,00
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.570.000,00
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.810.000,00
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.160.000,00
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.600.000,00
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.008.300.000,00
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.008.300.000,00

No	URAIAN	PAGU (Rp)
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	100.000.000,00
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	908.300.000,00

VII. URAIAN HASIL REVIU

Hasil reuiu diuraikan dalam rekapitulasi catatan hasil reuiu, sebagai berikut:

1. Pengujian Kelengkapan Dokumen Pendukung Penyusunan RKA-SKPD.

Dari hasil permintaan data kelengkapan terkait dokumen pendukung Penyusunan RKA SKPD, terdapat 1 (satu) dokumen yang belum ada, yaitu Kerangka Acuan Kerja/TOR.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil reuiu, dokumen pendukung penyusunan RKA-SKPD belum lengkap.

2. Pengujian Kelengkapan Pengisian Format RKA.

Dari hasil analisis dokumen terkait kelengkapan pengisian format RKA mencakup Sumber Dana, Lokasi, Waktu Pelaksanaan, Kelompok Sasaran, Jumlah N-1, Jumlah N dan Jumlah N+1, diketahui bahwa dari 41 (empat puluh satu) sub kegiatan terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang belum diisi lengkap pada lokasi kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil reuiu, kelengkapan pengisian format RKA belum lengkap.

3. Pengujian Kesesuaian Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu di RKA dan PPAS.

Dari hasil analisis dokumen dalam RKA-SKPD, diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) program, 27 (dua puluh tujuh) kegiatan, dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan dengan total pagu sebanyak Rp9.041.051.096,00

(sembilan miliar empat puluh satu juta lima puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah) telah sesuai dengan dokumen PPAS, dengan rincian sebagai berikut:

No	RKA		PPAS	
	URAIAN	PAGU (Rp)	URAIAN	PAGU (Rp)
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	50.000.000,00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	50.000.000,00
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.000.000.000,00	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.000.000.000,00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.000.000.000,00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.000.000.000,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.170.961.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.170.961.000,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.170.961.000,00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.170.961.000,00
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	50.000.000,00	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	50.000.000,00

No	RKA		PPAS	
	URAIAN	PAGU (Rp)	URAIAN	PAGU (Rp)
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.120.961.000,00	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.120.961.000,00
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.080.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.080.000.000,00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.080.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.080.000.000,00
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.080.000.000,00	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.080.000.000,00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	50.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	50.000.000,00
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	50.000.000,00	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	50.000.000,00
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	50.000.000,00	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	50.000.000,00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	100.000.000,00	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	100.000.000,00
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100.000.000,00	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100.000.000,00
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	100.000.000,00	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	100.000.000,00
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.581.790.096,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.581.790.096,00
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.284.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.284.000,00
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.276.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.276.000,00
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.366.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.366.000,00

No	RKA		PPAS	
	URAIAN	PAGU (Rp)	URAIAN	PAGU (Rp)
3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.560.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.560.000,00
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000,00
3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000,00
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.603.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.603.000,00
3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.479.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.479.000,00
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.027.724.096,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.027.724.096,00
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.005.990.096,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.005.990.096,00
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.318.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.318.000,00
3.31.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.416.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.416.000,00
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.550.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.550.000,00
3.31.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.200.000,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.200.000,00
3.31.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.350.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.350.000,00
3.31.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000,00
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	97.450.000,00	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	97.450.000,00
3.31.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	10.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	10.000.000,00
3.31.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	12.200.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	12.200.000,00
3.31.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.250.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.250.000,00
3.31.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00

No	RKA		PPAS	
	URAIAN	PAGU (Rp)	URAIAN	PAGU (Rp)
3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	460.680.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	460.680.000,00
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.100.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.100.000,00
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.820.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.820.000,00
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.820.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.820.000,00
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.700.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.700.000,00
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	321.240.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	321.240.000,00
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.298.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.298.000,00
3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	20.142.000,00	Pengadaan Mebel	20.142.000,00
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.156.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.156.000,00
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	627.234.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	627.234.000,00
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.154.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.154.000,00
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.180.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.180.000,00
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	525.900.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	525.900.000,00
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.570.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.570.000,00
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.810.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.810.000,00
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.160.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.160.000,00
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.600.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.600.000,00
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.008.300.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.008.300.000,00

No	RKA		PPAS	
	URAIAN	PAGU (Rp)	URAIAN	PAGU (Rp)
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.008.300.000,00	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.008.300.000,00
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	100.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	100.000.000,00
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	908.300.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	908.300.000,00

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil revidi, rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu dalam RKA-SKPD telah sesuai dengan PPAS

4. Pengujian Kesesuaian Rumusan Indikator dan Target Kinerja Sub Kegiatan di RKA dan PPAS.

Dari hasil analisis dokumen dalam RKA-SKPD terkait rumusan indikator dan target kinerja pada Sub Kegiatan yang mencakup Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil, diketahui bahwa dari 41 (empat puluh satu) sub kegiatan telah sesuai dengan dokumen PPAS, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	RKA		PPAS	
		Indikator	Target	Indikator	Target
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
	1. Capaian Program	Persentase Koperasi KSP/USP yang sehat	12.15 Persen	Persentase Koperasi KSP/USP yang sehat	12.15 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000

No	Uraian	RKA		PPAS	
		Indikator	Target	Indikator	Target
	3. Keluaran	Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Koperasi Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota	10 Koperasi	Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Koperasi Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota	10 Koperasi
	4. Hasil	Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan, perindustrian dan KUKM	13.5 Persen	Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan, perindustrian dan KUKM	13.5 Persen
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				
	1. Capaian Program	Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan	11.51 Persen	Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan	11.51 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.000.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.000.000.000
	3. Keluaran	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang
	4. Hasil	Persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	2.92 Persen	Persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	2.92 Persen
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				
	1. Capaian Program	Persentase UMKM yang Diberdayakan	22.7 Persen	Persentase UMKM yang Diberdayakan	22.7 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
	3. Keluaran	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	6 Kali	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	6 Kali
	4. Hasil	Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan, perindustrian dan KUKM	13.5 Persen	Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan, perindustrian dan KUKM	13.5 Persen

No	Uraian	RKA		PPAS	
		Indikator	Target	Indikator	Target
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				
	1. Capaian Program	Persentase UMKM yang Diberdayakan	22.7 Persen	Persentase UMKM yang Diberdayakan	22.7 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.120.961.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.120.961.000
	3. Keluaran	Jumlah sentra yang dibentuk	3 Sentra	Jumlah sentra yang dibentuk	3 Sentra
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	0 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	0 Unit Usaha
	4. Hasil	Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan, perindustrian dan KUKM	13.5 Persen	Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan, perindustrian dan KUKM	13.5 Persen
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				
	1. Capaian Program	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	22.88 Persen	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	22.88 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.080.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.080.000.000
	3. Keluaran	Jumlah peralatan yang disediakan	37 Unit Usaha	Jumlah peralatan yang disediakan	37 Unit Usaha
	4. Hasil	Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan, perindustrian dan KUKM	13.5 Persen	Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan, perindustrian dan KUKM	13.5 Persen
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				
	1. Capaian Program	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	50 Persen	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	50 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000

No	Uraian	RKA		PPAS	
		Indikator	Target	Indikator	Target
	3. Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	11 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	11 Kecamatan
	4. Hasil	Persentase rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan yang Diterbitkan	70 Persen	Persentase rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan yang Diterbitkan	70 Persen
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan				
	1. Capaian Program	Persentase produk lokal yang dipasarkan	33 UMKM	Persentase produk lokal yang dipasarkan	33 UMKM
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
	3. Keluaran	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen
	4. Hasil	Persentase rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan yang Diterbitkan	70 UMKM	Persentase rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan yang Diterbitkan	70 UMKM
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.276.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.276.000
	3. Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja/RKT)	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja/RKT)	3 Dokumen
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66,15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66,15 Persen
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.366.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.366.000

No	Uraian	RKA		PPAS	
		Indikator	Target	Indikator	Target
	3. Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)	1 Dokumen
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.560.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.560.000
	3. Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P)	1 Dokumen
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000
	3. Keluaran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	1 Dokumen
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000
	3. Keluaran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	1 Dokumen
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.603.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.603.000
	3. Keluaran	Jumlah Laporan Kinerja (Lakip/LKPJ)/LPPD, Buku Profil)	3 Dokumen	Jumlah Laporan Kinerja (Lakip/LKPJ)/LPPD, Buku Profil)	3 Dokumen
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.479.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.479.000

No	Uraian	RKA		PPAS	
		Indikator	Target	Indikator	Target
	3. Keluaran	Jumlah Dokumen SAKIP dan Implementasi RB (Cascading, PK, IKU, IKI, Rencana Aksi, Monev PK)	13 Dokumen	Jumlah Dokumen SAKIP dan Implementasi RB (Cascading, PK, IKU, IKI, Rencana Aksi, Monev PK)	13 Dokumen
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.005.990.096	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.005.990.096
	3. Keluaran	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	39 Orang	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	39 Orang
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000
	3. Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.318.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.318.000
	3. Keluaran	Jumlah SPJ Fungsional	12 Laporan	Jumlah SPJ Fungsional	12 Laporan
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.416.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.416.000
	3. Keluaran	Jumlah Laporan RF-K	12 Laporan	Jumlah Laporan RF-K	12 Laporan
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
3.31.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				

No	Uraian	RKA		PPAS	
		Indikator	Target	Indikator	Target
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.200.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.200.000
	3. Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.350.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.350.000
	3. Keluaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.000.000
	3. Keluaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
3.31.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000
	3. Keluaran	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (DUK, KGB, KP, KP4) yang tersusun	4 Dokumen	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (DUK, KGB, KP, KP4) yang tersusun	4 Dokumen
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.200.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.200.000

No	Uraian	RKA		PPAS	
		Indikator	Target	Indikator	Target
	3. Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	3 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	3 Laporan
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.250.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.250.000
	3. Keluaran	Jumlah dokumen evaluasi kinerja ASN (SKP, DP3) yang tersusun	2 Dokumen	Jumlah dokumen evaluasi kinerja ASN (SKP, DP3) yang tersusun	2 Dokumen
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
	3. Keluaran	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	4 ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	4 ASN
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000
	3. Keluaran	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	2 ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	2 ASN
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 64.100.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 64.100.000
	3. Keluaran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	70 Buah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	70 Buah

No	Uraian	RKA		PPAS	
		Indikator	Target	Indikator	Target
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.820.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.820.000
	3. Keluaran	Jumlah barang cetakan (spanduk) yang tersedia	83 Buah	Jumlah barang cetakan (spanduk) yang tersedia	83 Buah
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.820.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.820.000
	3. Keluaran	Jumlah tamu dinas yang terfasilitasi	500 Orang	Jumlah tamu dinas yang terfasilitasi	500 Orang
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.700.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.700.000
	3. Keluaran	Jumlah tamu dinas yang terfasilitasi	500 Orang	Jumlah tamu dinas yang terfasilitasi	500 Orang
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 321.240.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 321.240.000
	3. Keluaran	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Perindag KUKM yang tersusun	272 Laporan	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Perindag KUKM yang tersusun	272 Laporan
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.142.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.142.000
	3. Keluaran	Jumlah mebeleur yang disediakan	7 Unit	Jumlah mebeleur yang disediakan	7 Unit

No	Uraian	RKA		PPAS	
		Indikator	Target	Indikator	Target
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	1. Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.156.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.156.000
	3. Keluaran	Jumlah peralatan yang disediakan	7 Unit	Jumlah peralatan yang disediakan	7 Unit
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	1. Capaian Program	persentase Capaian kinerja (%)	100 Persen	persentase Capaian kinerja (%)	100 Persen
		Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.154.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.154.000
	3. Keluaran	Jumlah surat dinas yang terkirim	100 Buah	Jumlah surat dinas yang terkirim	100 Buah
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	1. Capaian Program	persentase Capaian kinerja (%)	100 Persen	persentase Capaian kinerja (%)	100 Persen
		Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 93.180.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 93.180.000
	3. Keluaran	Jumlah Layanan Telpn, Listrik dan Air yang tersedia	3 Buah	Jumlah Layanan Telpn, Listrik dan Air yang tersedia	3 Buah
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	1. Capaian Program	persentase Capaian kinerja (%)	100 Persen	persentase Capaian kinerja (%)	100 Persen
		Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen	Persentase Capaian Kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 525.900.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 525.900.000
	3. Keluaran	Jumlah PHL sebagai pelayan umum Perindag KUKM	52 Orang	Jumlah PHL sebagai pelayan umum Perindag KUKM	52 Orang
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

No	Uraian	RKA		PPAS	
		Indikator	Target	Indikator	Target
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	1. Capaian Program	persentase Capaian kinerja (%)	70.28 Persen	persentase Capaian kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.810.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.810.000
	3. Keluaran	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	1 Unit	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	1 Unit
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	1. Capaian Program	persentase Capaian kinerja (%)	70.28 Persen	persentase Capaian kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.160.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.160.000
	3. Keluaran	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara	2 Unit	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara	2 Unit
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	1. Capaian Program	persentase Capaian kinerja (%)	70.28 Persen	persentase Capaian kinerja (%)	70.28 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.600.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.600.000
	3. Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit
	4. Hasil	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	66.15 Persen
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				
	1. Capaian Program	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	15 Persen	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	15 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
	3. Keluaran	Pendampingan Sentra	11 Sentra	Pendampingan Sentra	11 Sentra

No	Uraian	RKA		PPAS	
		Indikator	Target	Indikator	Target
	4. Hasil	Persentase rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan yang Diterbitkan	70 Persen	Persentase rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan yang Diterbitkan	70 Persen
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				
	1. Capaian Program	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	15 Persen	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	15 Persen
	2. Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 908.300.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 908.300.000
	3. Keluaran	Bantuan Pengadaan Peralatan Sentra	11 Kecamatan	Bantuan Pengadaan Peralatan Sentra	11 Kecamatan
	4. Hasil	Persentase rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan yang Diterbitkan	70 Persen	Persentase rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan yang Diterbitkan	70 Persen

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil revidi, rumusan indikator dan target kinerja pada Sub Kegiatan dalam RKA-SKPD telah sesuai dengan PPAS.

5. Pengujian Kesesuaian Sub Komponen Belanja dengan Standar Biaya.

Dari hasil analisis dokumen terkait sub komponen belanja pada sub kegiatan di dalam RKA-SKPD telah sesuai dengan Standar Biaya yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil revidi, sub komponen belanja pada Sub Kegiatan dalam RKA-SKPD telah sesuai dengan standar biaya.

6. Pengujian Kelayakan/Efisiensi Anggaran Satuan Belanja.

Dari hasil analisis dokumen dan hasil wawancara untuk mendapatkan informasi terkait kelayakan/efisiensi anggaran satuan belanja pada sub kegiatan di dalam RKA-SKPD, terdapat uraian belanja yang tidak efisien dan efektif serta belum didukung dengan dokumen KAKTOR, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil revidu, terdapat 284 (dua ratus delapan puluh empat) uraian belanja pada Sub Kegiatan dalam RKA-SKPD yang tidak efisien dan efektif.

7. Pengujian Kepatuhan Penganggaran Belanja Barang.

Dari hasil analisis dokumen terkait kepatuhan penganggaran belanja barang diketahui bahwa dari 41 (empat puluh satu) Sub Kegiatan terdapat 27 (dua puluh tujuh) belanja yang belum menerapkan kaidah-kaidah penganggaran atau belum sesuai dengan kriteria belanja barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil revidu, dari 386 (tiga ratus delapan puluh enam) belanja barang pada RKA-SKPD terdapat 27 (dua puluh tujuh) belanja barang yang belum sesuai dengan kriteria penganggaran belanja barang.

8. Pengujian Kepatuhan Penganggaran Belanja Pemeliharaan.

Dari hasil analisis dokumen terkait kepatuhan penganggaran belanja pemeliharaan diketahui bahwa dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah menerapkan kaidah-kaidah penganggaran atau telah sesuai dengan kriteria belanja pemeliharaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil revidu, terdapat 3 (tiga) belanja pemeliharaan pada RKA-SKPD yang telah sesuai dengan kriteria penganggaran belanja pemeliharaan.

9. Pengujian Kepatuhan Penganggaran Belanja Barang Diserahkan.

Dari hasil analisis dokumen terkait kepatuhan penganggaran belanja barang diserahkan diketahui bahwa dari 1 (satu) Sub Kegiatan terdapat 27 (dua puluh tujuh) belanja dari 37 belanja yang belum menerapkan kaidah-kaidah penganggaran atau telah sesuai dengan kriteria belanja barang diserahkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil revidi, belanja barang diserahkan pada RKA-SKPD yang belum sesuai dengan kriteria sasaran prioritas pada RPJMD.

10. Pengujian Kepatuhan Penganggaran Belanja Modal.

Dari hasil analisis dokumen terkait kepatuhan penganggaran belanja modal diketahui bahwa dari 3 (satu) Sub Kegiatan telah menerapkan kaidah-kaidah penganggaran belanja modal dan dimasukkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ke dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil revidi, belanja modal pada RKA-SKPD telah sesuai dengan kriteria belanja modal dan telah menerapkan kaidah-kaidah penganggaran belanja modal.

Kondisi tersebut di atas belum sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya:

a. Pasal 93, mengatur bahwa :

- 1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3);
- 2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - (1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;
 - (2) penganggaran terpadu; dan
 - (3) penganggaran berdasarkan Kinerja.
- 3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun;

b. Pasal 94, mengatur bahwa:

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3).

c. Pasal 95, ayat (5) mengatur bahwa:

Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:

- 1) keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan;
- 2) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
- 3) Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

d. Pasal 97, mengatur bahwa:

- 1) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c berpedoman pada:
 - (a) indikator Kinerja;
 - (b) tolak ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;
 - (c) standar harga satuan;
 - (d) rencana kebutuhan BMD; dan
 - (e) Standar Pelayanan Minimal.
- 2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil;
- 3) Tolak ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ukuran prestasi kerja yang akandicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas,

efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan.

- 4) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
 - 5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan;
 - 6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4);
 - 7) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- e. Pasal 98, mengatur bahwa:
- 1) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya;
 - 2) Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan rincian obyek;
 - 3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan.

2. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.**
3. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pada Lampiran, Bab II huruf D BELANJA DAERAH, pada huruf b Belanja Barang dan Jasa yang mengatur bahwa :**
 - 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;
 - 2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD;
 - 3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - 4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
 - (a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
 - (b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (availability payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan,

- sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
- (c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor;
 - (d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri;
 - (e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- 5) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait;
- 6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas;
- 7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
- a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan

pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
- g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pada lampiran Bab II huruf D. BELANJA DAERAH pada huruf e. Belanja Hibah yang mengatur bahwa:

- 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

- 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) partai politik dan/atau
 - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
 - d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- 6) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah;
- 7) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

- 8) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
5. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pada Lampiran, BAB III huruf B, nomor 2. Ketentuan Dokumen RKA SKPD, huruf d. Rencana belanja memuat informasi mengenai:**
- 1) Urusan pemerintahan daerah memuat urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - 2) Organisasi memuat nama SKPD selaku PA;
 - 3) Standar Harga Satuan;
 - 4) RKBMD;
 - 5) Kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja, tolok ukur kinerja, dan sasaran kinerja yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - 6) Program memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan;
 - 7) Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan;
 - 8) Sub kegiatan memuat nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan;
 - 9) Akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian objek.
6. **Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Biaya Lingkup Pemerintah Daerah;**
7. **Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Standar Satuan Harga Lingkup Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;**

8. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Analisis Standar Belanja Lingkup Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

VIII. APRESIASI

Tim reviu menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kesempatan dan kerjasama dari seluruh pejabat dan pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama kegiatan reviu dilakukan.

Benteng, 23 September 2022

INSPEKTUR DAERAH,



H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19630727 199303 1 014